

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pada bagian ini akan dibahas tentang teori yang mendasari tentang penelitian ini. Pembahasan ini akan menjadi panduan dalam memahami permasalahan yang ada. Secara keseluruhan penelitian ini mencakup teori Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang relatif sesuai dengan persepsi diri seseorang, bukan hanya dari ketidakmampuan ekonomis tetapi juga dalam aspek sosial, politik, maupun spiritual (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2012). Suatu penduduk dapat dikatakan miskin dengan ciri-ciri rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraan yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia untuk pendidikan formal dan nonformal yang pada gilirannya menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan nonformal.

United Nations Development Programme (UNDP) mendeskripsikan kemiskinan sebagai suatu keadaan yang di mana kekurangan pendapatan juga kesulitan dalam bidang perekonomian. Kemiskinan juga dipandang sebagai keadaan yang di mana kurangnya akses pendidikan, kesehatan, dan air minum

yang bersih. UNDP memandang tingkat kemiskinan adalah suatu problematika multidimensi yakni tidak hanya sebatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi (Soleh, 2014).

Dalam mengukur tingkat kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini merujuk pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh pihak *Worldbank*. Pada pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran. Suatu penduduk dapat dikatakan sebagai penduduk miskin jika mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022).

2.1.1.1. Jenis-jenis Kemiskinan dan Ciri-ciri Penduduk Miskin

Jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya terdapat kemiskinan Alamiah dan kemiskinan buatan Jacobus et al., (2018).

1. Kemiskinan alamiah merupakan jenis kemiskinan yang terbentuk terjadi karena adanya kelangkaan sumber daya alam juga minimnya sarana prasarana umum seperti jalan raya, air bersih dan listrik serta kondisi tanah yang kurang subur. Daerah yang mempunyai karakteristik tersebut biasanya daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah yang tertinggal.
2. Kemiskinan buatan merupakan jenis kemiskinan yang terbentuk akibat dari modernisasi atau pembangunan yang dapat menyebabkan masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai sumber

daya, sarana, juga fasilitas ekonomi yang merata. Kemiskinan seperti ini merupakan efek negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*Developmentalism*) yang lazim di negara-negara berkembang. Tujuan mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan pemerataan hasil pembangunan, misalnya sektor industri menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi daripada sektor pertanian.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki empat bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2005).

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum

menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.1.2. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Chamsyah (2008) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah berupa hubungan-hubungan kompleks antara individu yang hidup dengan daya lemah dalam suatu tradisi keluarga, masyarakat dalam ruang struktur sosial (negara) yang rumit menganut sistem modern dalam cara produksinya. Teori

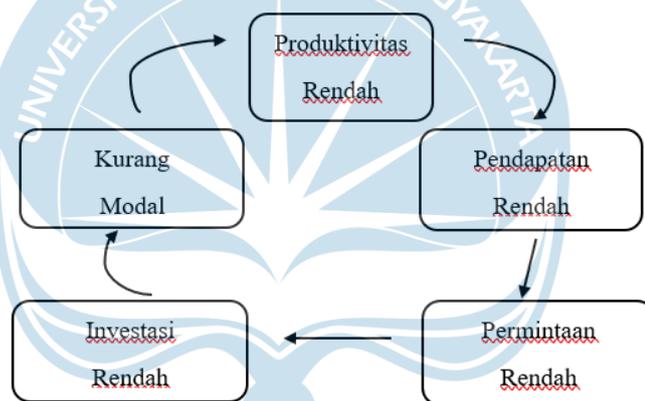
yang lazim untuk menjelaskan akar kemiskinan dikemukakan oleh Usman (1993), teori tersebut disebut teori marginalisasi, yang merupakan kemiskinan dianggap sebagai akibat dari adanya tabiat apatis, fatalisme, bergantung pada bantuan, rendah diri, sifat pemboros, konsumtif serta kurangnya jiwa untuk berwiraswasta. Beberapa pandangan juga dikemukakan oleh Munker dan Walter (2001) mengenai penyebab kemiskinan di antaranya:

- a) Rendahnya sumber daya dan persyaratan-persyaratan perdagangan yang tidak menguntungkan merupakan penyebab utama kemiskinan maka diperlukan peningkatan produktivitas, kebebasan dalam akses ke pasar, serta memberlakukan harga yang wajar untuk produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang miskin.
- b) Buruknya kondisi lingkungan di alam yang menjadi penyebab krusial meluasnya kemiskinan.
- c) Rendahnya pengetahuan dan akses masyarakat terhadap informasi mengenai pendidikan, pelatihan dan bimbingan maka harus dilakukan upaya pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Kuncoro (2006), mengidentifikasi tiga penyebab terjadinya kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi, yakni pertama kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, kemiskinan tersebut muncul akibat dari perbedaan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah sehingga produktivitas rendah yang pada gilirannya

tingkat upahnya rendah. Ketiga, penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious cycle poverty*).

Menurut Nurkse dalam Kuncoro (2006), mengungkapkan bahwa adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menjadi penyebab produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pada akhirnya juga rendah. Pendapatan yang rendah bersangkutan dengan pada rendahnya tabungan dan investasi, dan kemudian rendahnya investasi tersebut mengakibatkan keterbelakangan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1



Sumber: Kuncoro (2006)

Gambar 2. 1

Lingkaran Setan Kemiskinan Versi Nurkse

2.1.1.3. Strategi dan Kebijakan Penurunan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sudah banyak dilakukan di negara berkembang dengan tujuan mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Menurut Todaro dan Smith (2015), strategi pengentasan kemiskinan

yang efektif yaitu dengan cara transfer langsung dan subsidi dengan beberapa syarat, yaitu:

1. Transfer dan bantuan subsidi kepada masyarakat perlu dipastikan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan karena sumber daya yang terbatas.
2. Penerima tidak bergantung pada bantuan, tetapi dapat termotivasi untuk membangun aset seperti pendidikan anak yang berguna untuk mencegah anak tetap dalam kondisi miskin.

Menurut Nafriger (2005), dalam bukunya yang berjudul *Economic Development* menjelaskan beberapa strategi dalam pengentasan kemiskinan yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan pendidikan dan latihan. Investasi modal manusia penting untuk menghasilkan pendapatan sepanjang waktu. Pendidikan dasar dan gratis adalah salah satu untuk menyalurkan modal manusia kepada masyarakat yang kurang mampu. Kualitas pendidikan perlu diseimbangkan dengan peningkatan derajat kesehatan dan nutrisi penduduk khususnya pada anak-anak.
2. Permodalan dan perkreditan. Salah satu masalah yang dirasakan oleh penduduk miskin yakni kesulitan dalam mengakses sumber kredit dan permodalan. Strategi yang dilakukan adalah dengan cara program perkreditan dan permodalan khusus bagi masyarakat miskin dengan beberapa kebijakan yang tentunya lebih mudah.

2.1.2. Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang sudah masuk kedalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, namun tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan (Suaidah & Cahyono, 2013).

Menurut Sukirno (2011), pengangguran adalah keadaan tanpa pekerjaan yang dihadapi oleh segolongan tenaga kerja yang berusaha mencari pekerjaan tetapi tidak memperolehnya. Pengangguran (*unemployment*) adalah masalah yang hampir selalu ada dalam setiap perekonomian, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum pengangguran didefinisikan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan dan mereka inginkan (Muana, 2001).

Menurut BPS (2022), dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Semakin tinggi angka pengangguran maka menunjukkan bahwa kondisi penduduk yang kurang baik, dikarenakan tidak semua angkatan kerja telah mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi juga menerangkan bahwa penduduk tersebut hanya berfungsi sebagai konsumen tetapi tidak berfungsi sebagai faktor input produksi yang dapat menghasilkan output.

Untuk mengukur tingkat pengangguran suatu wilayah bisa diperoleh melalui dua pendekatan:

- a) Pendekatan Angkatan Kerja (*Labour force approach*). Besar kecilnya tingkat pengangguran dapat dihitung berdasarkan persentase dan perbandingan jumlah antara orang yang menganggur dan jumlah angkatan kerja.

$$\text{Pengangguran} = \frac{\text{jumlah yang menganggur}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

- b) Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*)
1. Bekerja penuh (*employed*) merupakan orang yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam per minggu.
 2. Setengah menganggur, yakni penduduk atau angkatan kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu, tidak yang bekerja sementara.

2.1.2.1. Teori Tingkat Pengangguran

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang teori pengangguran di Indonesia, yakni:

1. Teori Klasik

Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena adanya mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga (Gilarso, 2004). Teori klasik jika terjadi berlebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut

mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan penambahan produksi diakibatkan keuntungan yang di dapat dari rendahnya biaya. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga relatif stabil.

2. Teori Keynes

Teori Keynes mengatakan bahwa hal tersebut berlawanan dengan teori Klasik, menurut Teori Keynes pengangguran tersebut terjadi akibat dari permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan diakibatkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal tersebut tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja melonjak, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena turunnya upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang. Sehingga produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut mengakibatkan produsen mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja (Sukirno, 2008). Selain itu, pada kenyataannya upah cenderung sulit untuk mengalami penurunan, sehingga teori Keynes dianggap tidak tepat.

3. Teori Kependudukan dari Malthus

Teori Malthus dalam buku Ekonomi Sumber Daya (Mulyadi, 2014), menyatakan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia

berkembang sesuai dengan deret ukur (*geometric progression*, dari 2 ke 4,8,16,32 dan seterusnya), dan pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung (*arithmetic progression*, dari 2 ke 4,6,8 dan seterusnya). Karena perkembangan jumlah manusia jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, maka Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka yang akan menimpa umat manusia.

Apabila dijelaskan secara rinci teori Malthus menyatakan bahwa penduduk cenderung bertambah secara tak terbatas sampai mencapai batas persediaan makanan, dan permasalahan ini menimbulkan manusia saling bersaing dengan adanya persaingan ini maka akan ada manusia yang tersisih dan tidak mampu memperoleh makanan. Penjelasan tersebut dapat diartikan semakin banyak jumlah penduduk maka akan terciptanya angkatan kerja yang semakin banyak pula, dan hal ini tak diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia. Dikarenakan jumlah kesempatan kerja yang tersedia sedikit maka angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan akan menjadi pengangguran.

2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan *representative*. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP). Menurut UNDP, Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Konsep pembangunan manusia adalah pembangunan yang dilakukan mengutamakan pada pembangunan sumber daya manusia yang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengandung makna meningkatkan daya serap dasar penduduk yang kemudian akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah (Mahroji, 2019).

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar. Indeks Pembangunan Manusia adalah komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan. Pembangunan adalah sebuah proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik (Baeti, 2013).

Sebagai ukuran kualitas hidup, Indeks Pembangunan Manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi mendasar. Dimensi tersebut meliputi kesehatan yang baik dan umur panjang; pengetahuan, dan kehidupan yang

layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki implikasi yang sangat luas karena berkaitan dengan banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir. Selain itu, untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan kombinasi indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dalam dimensi mengukur kehidupan yang layak, indikator daya beli masyarakat digunakan untuk beberapa kebutuhan pokok makanan dan non makanan, yang dapat dilihat pada besaran rata-rata pengeluaran perkapita, sebagai alat pendapatan yang mewakili pembangunan untuk mencapai kehidupan yang layak (BPS, 2023).

Pembangunan manusia membuat manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya input dari pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari pembangunan ialah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, hidup sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

2.1.3.1. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yakni:

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir, tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).

3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$IPM = (X1 + X2 + X3)/3$$

dimana:

- X1 : Angka harapan hidup
- X2 : Tingkat Pendidikan
- X3 : Tingkat kehidupan yang layak

Dalam skalanya Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengelompokkan, yakni:

1. Kelompok sangat tinggi dengan skala Indeks Pembangunan Manusia lebih atau sama dengan 80 ($IPM \geq 80$).
2. Kelompok tinggi dengan skala Indeks Pembangunan Manusia antara lebih dari atau sama dengan 70 atau kurang dari 80 ($70 \leq IPM \leq 80$).
3. Kelompok sedang dengan skala Indeks Pembangunan Manusia antara lebih dari atau sama dengan 60 atau kurang dari 70 ($60 \leq IPM \leq 70$).
4. Kelompok rendah dengan skala Indeks Pembangunan Manusia kurang dari 60 ($IPM < 60$).

2.1.4. Tingkat Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat pembangunan daerah, termasuk karakteristik tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa daerah dengan

sistem infrastruktur yang lebih baik memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada daerah dengan infrastruktur yang terbatas (Bappenas, 2003).

Berkenaan dengan desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengelola barang publik lokal dan barang yang menghasilkan eksternalitas lokal. Akibatnya, pemerintah daerah yang mengelola keuangan daerah dengan baik memiliki peluang lebih besar untuk menyediakan infrastruktur publik yang lebih baik seperti listrik, air bersih, dan jalan (Nugraheni & Priyarsono, 2012).

2.1.5. Modal Manusia (*Human Capital*)

Konsep *human capital* ini secara sederhana berarti kemampuan pada diri manusia, seperti pengetahuan dan keterampilan. Menurut Rastogi (2000), menyatakan bahwa *human capital* adalah pengetahuan, kompetensi, sikap, kesehatan, dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Dalam menciptakan modal manusia yang produktif sehingga dapat memperoleh nilai ekonomi yang tinggi tentunya diperoleh dengan pendidikan, pengalaman, dan pelatihan.

Secara teoritis, teori *human capital* ini merupakan teori yang mensyaratkan dengan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten. Dengan itu bisa memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produktivitas perekonomian. Untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas di butuhkan pembentukan modal sosial (*human capital*). Pembentukan ini adalah dengan cara memperoleh sejumlah individu yang memiliki karakter yang kuat agar dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan (Idris, 2018).

Menurut Acemoglu dan Autor (2012), modal manusia dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan modal manusia harus dibarengi dengan adanya pengembangan modal fisik dalam suatu negara dalam hal ini adalah investasi terhadap fasilitas, infrastruktur, dan teknologi.

2.2. Studi Terkait

Sayifullah dan Gandasari (2016), menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten dalam waktu kurun 2008 sampai 2012 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan panel data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara variabel indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan. Secara parsial, variabel indeks pembangunan manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Wiguna (2013), menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendidikan, tingkat pengangguran, terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2005-2010 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan panel data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan di Jawa Tengah, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Giovanni (2018), menganalisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa pada tahun 2009-2016 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengangguran dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY pada tahun 2009-2016, sedangkan variabel PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi tersebut.

Suripto dan Subayil (2020), menganalisis berapa besar pengaruh dari tingkat pendidikan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2010-2017 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Ristika *et al.*, (2021), menganalisis pengaruh dari jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2019 dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan regresi linier berganda dengan

model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur, variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Secara simultan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Nugroho (2015), menganalisis tentang peran infrastruktur terhadap kemiskinan. Teknis yang digunakan dalam analisis regresi sederhana serta menggunakan data panel 26 provinsi pada tahun 2000 – 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur berdampak terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai proksinya, atau dengan kata lain hubungan antara penyediaan infrastruktur dan kemiskinan adalah hubungan yang tidak langsung.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga variabel Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2021.

2. Diduga variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2021.
3. Diduga variabel Tingkat Infrastruktur berpengaruh negatif terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 – 2021.

